



RENCANA KERJA (RENJA) BKPSDM KAB. BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Kawasan Bukit Trikora No. Telp. (0462) 22222 01.22222 02
Kode Pos 94785 SALAKAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 dapat diselesaikan. Renja merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya merealisasikan target dan sasaran penataan manajemen ASN untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah sesuai semangat reformasi birokrasi untuk perbaikan pelayanan publik.

Dalam dokumen Renja ini, setiap program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, telah disesuaikan dengan rencana pencapaian indikator target dan sasaran pertahunnya menurut Rencana Strategi (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023-2026 sehingga Renja yang disusun mempunyai hubungan yang sistematis dan logis dengan Renstra dan RPD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026.

Tentunya masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam dokumen perencanaan Renja ini, maka evaluasi tetap dilakukan untuk perbaikan selanjutnya. Semoga dokumen Renja ini bermanfaat bagi pelaku program dan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sendiri maupun stakeholder lainnya.

Salakan, 15 April 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MARJAM MAHMUD IBAAD, SH

Pembina Tkt.I

NIP.19670828 200012 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	6
BABII HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	32
BABIII TUJUAN DAN SASARAN	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	34
3.3. Program dan Kegiatan	34
BABIV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	44
BAB V PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan pada level organisasi perangkat daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisikan informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan OPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai dengan tupoksinya serta memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Renja BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai

Kepulauan Tahun 2023-2026 dengan fokus pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi strategis yang dihadapi BKPSDM saat ini, evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM tahun sebelumnya serta evaluasi kinerja pencapaian Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Kota Antarprovinsi;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 112);
17. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan;

18. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten.
19. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tugas Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 adalah sebagai pedoman, arah serta acuan dalam penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring proses dan kinerja pembangunan yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan.

Tujuan disusunnya Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan adalah untuk :

1. Menjabarkan tujuan, sasaran dan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
2. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
3. Menyediakan dokumen sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan pembangunan BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra

Pencapaian target kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan jika didasarkan pada target indikator Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026, sejak tahun 2022 hingga tahun 2023 dari 3 (tiga) program teknis urusan pemerintahan fungsi penunjang kepegawaian dengan 13 (tiga belas) indikator kegiatan secara keseluruhan mencapai target rata – rata sebesar 84%.

Berikut Evaluasi kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan selama tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada program ini realisasi anggaran tahun 2024 tercapai sebesar 97%, atau sebesar Rp. **5.121.225.712,-** dari anggaran Rp. **5.296.775.000,-**. Sedangkan capaian indikator kinerja mencapai 100%, yang berarti dari segi anggaran program ini mencapai target yang telah ditetapkan tetapi dari segi capaian indikator tidak mencapai target. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran sehingga semua kegiatan yang sudah direncanakan dalam renstra dan renja tidak dapat diakomodir.

2. Program Kepegawaian Daerah

Realisasi anggaran sebesar Rp. **1.445.348.179,-** (96%) dari anggaran Rp. **1.507.378.500,-** sedangkan capaian indikator kinerja mencapai 90%. Berikut ini Tabel T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Realisasi anggaran sebesar Rp. **2.025.390.180,-** (99%) dari anggaran Rp. **2.051.581.500,-** sedangkan capaian indikator kinerja mencapai 99%. Berikut ini Tabel T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

TABEL T-C. 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN
PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2023 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n- 1)2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n- 1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03	KEPEGAWAIAN									
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	-
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	-

5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	-
5.03.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
5.03.01.2.05.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	43 Paket	43 Paket	43 Pasang	0	0%	43 Pasang	0	-
5.03.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai Yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya persemayaman dan pelepasan jenazah anggota Korpri	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	-
5.03.01.2.05.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	0	0	0	0	15 Orang	0	-
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	-
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0	0%	1 Paket	1 Paket	-

5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	-
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	-
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	-
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	-
5.03.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
5.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%	1 Unit	1 Unit	-
5.03.01.2.07.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%	1 Unit	1 Unit	-
5.03.01.2.07.01	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%	1 Unit	1 Unit	-
5.03.01.2.07.01	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer kantor yang diadakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0%	1 Unit	1 Unit	-

5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	-
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	-
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	-
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	-
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	-
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya gedung/ kantor BKD	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	-

5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH									
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN									
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	-
5.03.02.2.01.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	-
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	-
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0	0%	12 Dokumen	12 Dokumen	-
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0%	3 Dokumen	3 Dokumen	-
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN									
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	-

5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen	0	0%	500 Dokumen	500 Dokumen	-
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	-
5.03.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN									
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	100 Orang	100 Orang	0	0%	100 Orang	100 Orang	-
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	-
5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	1 orang	1 orang	1 orang	0	0%	1 orang	1 orang	-
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokume	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	-
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	-
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	0	0%	30 Orang	30 Orang	-

5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	0	0%	30 Orang	30 Orang	-
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	0	0%	20 Laporan	20 Laporan	-
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
	Pengembangan Kompetensi Teknis									
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100 Orang	100 Orang	100 Orang	0	0%	100 Orang	100 Orang	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 merupakan representasi dari strategi penataan manajemen ASN dengan kebijakan membangun sumber daya aparatur yang berkinerja tinggi dan sejahtera. Kinerja harus dapat diukur satuannya agar bisa dinilai tingkat keberhasilannya dalam pelaksanaan kebijakan melalui program dan kegiatan. Hasil kinerja pelayanan selama tahun 2023 dan tahun berikutnya menjadi *trend* yang terus meningkatkan sesuai rumusan kebijakan dalam Rencana Strategis.

Berikut ini Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.

TABEL T-C. 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	INDIKATOR	SPM/STAN DAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023 (n-2)	TAHUN 2024 (n-1)	TAHUN 2025 (n)	TAHUN 2026 (n+1)	TAHUN 2023 (n-2)	TAHUN 2022 (n-1)	TAHUN 2025 (n)	TAHUN 2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Profesionalitas ASN	6,03%	61-70	61-70	71-75	75-80	81-85	0	34,58	75-80	81-85	Capaian Tahun 2022 Kategori Sangat Rendah

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan sumber daya aparatur di lingkup Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mampu melaksanakan perannya yaitu melakukan perencanaan, penempatan dan pengangkatan dalam jabatan, pengembangan pegawai, pelaksanaan promosi, mutasi, pensiun dan pemberhentian pegawai, pembinaan Korpri serta pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang kesemuanya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai kewenangan dalam penataan manajemen sumber daya manusia aparatur di daerah.

Arah dan kebijakan yang ditempuh berpedoman pada RPD Tahun 2023 - 2026 Kabupaten Banggai Kepulauan serta harus selaras dengan program pengembangan sumber daya manusia aparatur/ASN secara nasional. Sesuai dengan arah kebijakan nasional tentang pengembangan sumber daya manusia aparatur adalah mewujudkan *SmartASN* 2020-2024. Ada 6 langkah strategis mewujudkan *SmartASN* 2020-2024 yaitu rekrutmen cpns menggunakan computer assisted test (CAT), pengembangan kompetensi, pengembangan pola

karir, pengembangan karir, promosi melalui seleksi terbuka dan rencana suksesi.

Pola penataan manajemen sumber daya manusia harus diubah secara signifikan untuk mencapai keberhasilan dalam mewujudkan *SmartASN* sesuai dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Program dan kebijakan sistem merit harus dijalankan yaitu dengan menempatkan setiap pejabat ASN sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerjanya serta rekam jejak pegawai ASN yang bersangkutan secara adil, transparan dan objektif.

Agar ASN berkinerja harus dikembangkan sistem penilaian kinerja ASN yang lebih akurat, objektif dan transparan serta peningkatan disiplin ASN dan kesejahteraan ASN serta pengembangan pola karier akan menjamin kepastian karier dan semangat kerja ASN. Untuk mengukur kualitas setiap ASN maka kompetensi, kinerja dan disiplin menjadi indikator dalam penilaian.

Penempatan pegawai ASN harus dikembalikan pada posisinya sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi. Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/102/M.SM.02.00/2017 Tanggal 10 April 2017 maka pemerintah daerah harus segera melakukan penataan jabatan melalui analisis jabatan dan melakukan rotasi dan mutasi jabatan berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pengalaman tugas. Ini bagian dari penataan manajemen ASN dalam menerapkan sistem merit.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia maka isu-isu penting yang menjadi fokus dalam penataan manajemen ASN sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kinerja birokrasi dan layanan publik akibat lemahnya profesionalisme dan kompetensi aparatur dan masih kurangnya motivasi, inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Penempatan ASN yang tidak sesuai dengan pendidikan serta belum merata disetiap perangkat daerah.
3. Pengembangan karir jabatan belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dan pola karir yang jelas.
4. Sistem aplikasi (SIMPEG) belum terintegritas secara keseluruhan sehingga tidak terkoneksi ketika ada perubahan data kepegawaian.
5. Kurangnya anggaran untuk pengembangan kompetensi sehingga jumlah ASN yang mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional belum maksimal serta kurangnya sarana dan prasarana diklat.
6. Masih banyaknya pelanggaran disiplin ASN.

Langkah kebijakan yang harus dilaksanakan dalam penataan manajemen ASN antara lain :

- Peningkatan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi dengan penggunaan aplikasi pendukung pelayanan kepegawaian.
- Meningkatkan proses layanan kepegawaian (Layanan pensiun, pembuatan kartu pegawai, kenaikan pangkat dan berkala, mutasi).
- Penyediaan data kepegawaian yang akurat.
- Penyediaan sarana dan prasarana kantor dan fasilitas kediklatan.
- Meningkatkan pendidikan aparatur melalui bantuan tugas belajar, izin belajar;
- Pengadaan ASN sesuai dengan kualifikasinya dan kebutuhan;
- Penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi/pendidikannya dan kompetensinya;

- Pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi/Assiessment center bagi ASN dan pejabat di lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Peningkatan Pembinaan dan penegakan disiplin;
- Peningkatan kinerja ASN dan pemberian penghargaan bagi ASN;
- Fasilitasi lembaga profesi ASN.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, keseluruhan program dan kegiatan mengalami perubahan nama dan indikator yang secara tidak langsung berdampak terhadap penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah. Dikarenakan berubahnya seluruh nama program dan kegiatan beserta indikator – indikatornya sehingga review terhadap rancangan awal RKPD menyesuaikan dengan peraturan tersebut. Penyesuaian pemutakhiran dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Berikut ini Tabel T-C. 31 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

TABEL. 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

RANCANGAN AWAL RKPD									RANCANGAN RKPD					CATA TAN PENT ING	
KODE					PROGRAM/KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGE T CAPAIA N	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/KEGIAT AN/ SUB.KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGE T CAPAIA N	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN											
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	03				KEPEGAWAIAN				13.826.906.992	KEPEGAWAIAN				13.826.906.992	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.544.517.792	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.544.517.792	
5	03	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.090.953.792	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.090.953.792	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Salakan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	45 Orang	2.939.967.792	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Salakan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	45 Orang	2.939.967.792	
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Salakan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	1,138,986,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Salakan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	1,138,986,000	

5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Salakan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	3 Laporan	12,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Salakan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	3 Laporan	12,000,000	
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				643.141.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				643.141.000	
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Salakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	35.400.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Salakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	35.400.000	
5	03	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Salakan	Jumlah laporan pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	1 Laporan	297.741.000	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Salakan	Jumlah laporan pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	1 Laporan	297.741.000	
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jakarta dan Provinsi Lainnya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	310,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jakarta dan Provinsi Lainnya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	310,000,000	

5	03	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				439.801.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				439.801.000	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Salakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38 Paket	50.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Salakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38 Paket	50.500.000	
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Salakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	3,231,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Salakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	3,231,000	
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Salakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	30.490.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Salakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	30.490.000	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Salakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	16,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Salakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	16,000,000	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Salakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	3 Dokumen	12.900.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Salakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	3 Dokumen	12.900.000	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta, Makassar , Palu dan Provinsi Lainnya	Jumlah laporan penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	326.680.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta, Makassar , Palu dan Provinsi Lainnya	Jumlah laporan penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	326.680.000	

5	03	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.745.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.745.000.000	
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Salakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Salakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000	
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	245.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	245.000.000	
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.000.000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.000.000,000	
5	03	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				566.092.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				566.092.000	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salakan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salakan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12.000.000	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Salakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	3 Laporan	132.192.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Salakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	3 Laporan	132.192.000	

5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Salakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	421.900.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Salakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	421.900.000	
5	03	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				59.530.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				59.530.000	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Salakan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit	48.530.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Salakan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit	48.530.000	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salakan	Jumlah peralatan dan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	11,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salakan	Jumlah peralatan dan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	11,000,000	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				6.282.389.200	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				6.282.389.200	
5	03	02	2.01		Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1.829.343.400	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1.829.343.400	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Salakan, Palu, Makassar , Jakarta/P rovinsi Lainnya	Jumlah dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	522.422.500	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Salakan, Palu, Makassar , Jakarta/P rovinsi Lainnya	Jumlah dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	522.422.500	

5	03	02	2.01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Salakan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	11 Dokumen	302.534.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Salakan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	11 Dokumen	302.534.000	
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Salakan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	416.533.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Salakan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	416.533.000	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Salakan, Makassar, Jakarta/Provinsi Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	476.276.900	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Salakan, Makassar, Jakarta/Provinsi Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	476.276.900	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Palu dan Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3 Dokumen	111.577.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Palu dan Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3 Dokumen	111.577.000	
5	03	02	2.02		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN				561.385.600	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN				561.385.600	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Salakan	Jumlah Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan administrasi, jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar daerah	1 Dokumen	133.003.400	Pengelolaan Mutasi ASN	Salakan	Jumlah Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan administrasi, jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar daerah	1 Dokumen	133.003.400	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Palu, Makassar dan Jakarta	Jumlah Pengelolaaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dokumen	109.080.900	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Palu, Makassar dan Jakarta	Jumlah Pengelolaaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dokumen	109.080.900	

5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Salakan, palu, Jakarta/P rovinsi Lainnya	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan promosi ASN	1 Dokumen	319.301.300	Pengelolaan Promosi ASN	Salakan, palu, Jakarta/P rovinsi Lainnya	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan promosi ASN	1 Dokumen	319.301.300	
5	03	02	2.03		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN				3.375.996.600	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN				3.375.996.600	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Palu	Jumlah ASN Yang Meningkat Kapasitasnya	200 orang	20.000.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Palu	Jumlah ASN Yang Meningkat Kapasitasnya	200 orang	20.000.000	
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Palu dan Jakajrta	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	1 Dokumen	319.620.800	Pengelolaan Assessment Center	Palu dan Jakajrta	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	1 Dokumen	319.620.800	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Salakan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	1 Orang	25,000,000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Salakan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	1 Orang	25,000,000	
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Salakan, Palu dan Provinsi Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen	3.011.375.800	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Salakan, Palu dan Provinsi Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen	3.011.375.800	

5	03	02	2.04		Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				515.663.600	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				515.663.600	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Salakan, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja aparatur	1 Dokumen	57.654.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Salakan, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja aparatur	1 Dokumen	57.654.000	
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jakarta	Jumlah ASN Yang Diberikan Penghargaan	30 Orang	120.796.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jakarta	Jumlah ASN Yang Diberikan Penghargaan	30 Orang	120.796.000	
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Palu dan Jakajrta	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	210 Orang	81.213.600	Pembinaan Disiplin ASN	Palu dan Jakajrta	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	210 Orang	81.213.600	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Tersebar di Wilayah Kab. Bangkep, Palu dan Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	30 Laporan	256.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Tersebar di Wilayah Kab. Bangkep, Palu dan Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	30 Laporan	256.000.000	

1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai tugas di Bidang Kepegawaian, yang bersentuhan langsung dengan ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan difokuskan pada pelayanan kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Usulan masyarakat yang terangkum dalam RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 menjelaskan tidak adanya usulan masyarakat yang termasuk dalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025. Berikut ini Tabel T-C. 32 Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik adalah merupakan salah satu dari tujuh agenda pokok Pembangunan Nasional Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Agenda pokok yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu pada agenda ketujuh yang berbunyi “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik”. Dari tujuh agenda tersebut terbagi lagi menjadi lima sasaran utama yang harus diwujudkan dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Lima Sasaran Utama Pembangunan Nasional 2020-2024 yaitu:

1. Pembangunan Infrastruktur;
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
3. Mendorong Investasi;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Penggunaan APBN.

Dari lima sasaran tersebut yang berkaitan langsung dengan peningkatan kinerja pemerintahan yaitu khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan selaku pelaksanaan kebijakan publik, yaitu **“Reformasi Birokrasi”** agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efesiensi lembaga.

Dalam mendukung kebijakan nasional tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan menyusun Renja dengan berbagai sasaran kerja yang selaras dan kontributif terhadap kebijakan nasional, terutama kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara selaku pelaksana kebijakan publik agar menjadi lebih profesional.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan menggambarkan arah strategis badan dan perbaikan - perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 - 2026 yaitu pada tujuan pertama ***“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan”***, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan telah menetapkan tujuan organisasi yaitu : ***“Meningkatnya profesionalitas ASN*** dengan indikator ***indeks profesionalitas ASN***; Dari tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian.
2. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur sipil negara.

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Tahun 2023-2026 dan RKPD Tahun 2023-2026, dimana pemilihan program dan kegiatan dalam Renstra mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1) Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 3) Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1) Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2) Sub. Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas;
 - 3) Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1) Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 2) Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 3) Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

- 4) Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 5) Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6) Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1) Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel;
 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1) Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1) Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 3) Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH.
 1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
 - 1) Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;

- 2) Sub. Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN;
 - 3) Sub. Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN;
 - 4) Sub. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - 5) Sub. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian;
2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN;
 - 1) Sub. Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN;
 - 2) Sub. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
 - 3) Sub. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN;
 3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN;
 - 1) Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN;
 - 2) Sub. Kegiatan Pengelolaan Assessment Center;
 - 3) Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
 - 4) Sub. Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat;
 4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - 1) Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - 2) Sub. Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
 - 3) Sub. Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN;
 - 4) Sub. Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN;
3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.
 1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis;
 - 1). Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;

Berikut ini Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

TABEL. 5

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA /
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	03				KEPEGAWAIAN				6.197.140.400				13.826.906.992
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.257.044.400				7.544.517.792
5	03	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.495.773.400				4.090.953.792
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Salakan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	45 Orang	2.722.192.400	APBD		45 Orang	2.939.967.792
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Salakan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	761.581.000	APBD		12 Dokumen	1,138,986,000

5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Salakan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	3 Laporan	12,000,000	APBD		3 Laporan	12,000,000
5	03	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-				643.141.000
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Salakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	-	APBD		2 Paket	35.400.000
5	03	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Salakan	Jumlah laporan pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	1 Laporan	-	APBD		1 Laporan	297.741.000
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jakarta dan Provinsi Lainnya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	-	APBD		20 Orang	310,000,000
5	03	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				170.231.000				439.801.000
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Salakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38 Paket	30.000.000	APBD		38 Paket	50.500.000

5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Salakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	3,231,000	APBD		1 Paket	3,231,000
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Salakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	25.000.000	APBD		2 Paket	30.490.000
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Salakan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	9.000.000	APBD		1 Paket	16,000,000
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Salakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	3 Dokumen	3.000.000	APBD		3 Dokumen	12.900.000
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta, Makassar, Palu dan Provinsi Lainnya	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	100.000.000	APBD		1 Laporan	326.680.000
5	03	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				65.000.000				1.745.000.000
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Salakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	APBD		1 Unit	500,000,000

5	03	01	2.07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	65.000.000	APBD		12 Unit	245.000.000
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	APBD		1 Unit	1.000.000,000,000
5	03	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				481.690.000				566.092.000
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salakan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	4.000.000	APBD		12 Laporan	12.000.000
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Salakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	3 Laporan	140.000.000	APBD		3 Laporan	132.192.000
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Salakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	337.690.000	APBD		1 Laporan	421.900.000
5	03	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				44.350.000				59.530.000
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Salakan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit	33.350.000	APBD		1 Unit	48.530.000

5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salakan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	11,000,000	APBD		6 Unit	11,000,000
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				796.096.000				6.282.389.200
5	03	02	2.01		Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				386.096.000				1.829.343.400
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Salakan, Palu, Makassar, Jakarta/Provinsi Lainnya	Jumlah dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	181.096.000	APBD		1 Dokumen	522.422.500
5	03	02	2.01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Salakan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	11 Dokumen	50.000.000	APBD		11 Dokumen	302.534.000
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Salakan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	65.000.000	APBD		1 Lembaga	416.533.000
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Salakan, Makassar, Jakarta/Provinsi Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	476.276.900
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Palu dan Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3 Dokumen	40.000.000	APBD		3 Dokumen	111.577.000
5	03	02	2.02		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN				200.000.000				561.385.600

5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Salakan	Jumlah Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan administrasi, jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar daerah	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	133.003.400
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Palu, Makassar dan Jakarta	Jumlah Pengelolaaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dokumen	50.000.000	APBD		500 Dokumen	109.080.900
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Salakan, palu, Jakarta/Provinsi Lainnya	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan promosi ASN	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	319.301.300
5	03	02	2.03		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN				95.000.000				3.375.996.600
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Palu	Jumlah ASN Yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 orang	20.000.000	APBD		200 orang	20.000.000
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Palu dan Jakajrta	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	319.620.800
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Salakan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	1 Orang	-	APBD		1 Orang	25,000,000
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Salakan, Palu dan Provinsi Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen	50.000.000	APBD		2 Dokumen	3.011.375.800
5	03	02	2.04		Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				115.000.000				515.663.600

5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Salakan, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja aparatur	1 Dokumen	15.000.000	APBD		1 Dokumen	57.654.000
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jakarta	Jumlah ASN Yang Diberikan Penghargaan	30 Orang	60.000.000	APBD		30 Orang	120.796.000
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Palu dan Jakarta	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	210 Orang	15.000.000	APBD		210 Orang	81.213.600
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Tersebar di Wilayah Kab. Bangkep, Palu dan Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	30 Laporan	25.000.000	APBD		30 Laporan	256.000.000
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				1.144.000.000				
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1.144.000.000				
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Tersebar di Wilayah Kab. Banggai Kepulauan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	5 Laporan	1.144.000.000	APBD		5 Laporan	3.011.375.800

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RENSTRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan program pendukung langsung dalam pencapaian kinerja setiap bidang dan bagian yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahunan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Dalam rangka melaksanakan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dalam rencana kerja Tahun 2025 menetapkan dalam 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan Total Anggaran Belanja sebesar Rp. **13.826.906.992,-** yang berasal dari APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan disusun berdasarkan penyelarasan program dan kegiatan serta dengan melakukan pendekatan prioritas kebutuhan seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 - 2026 dan penjabaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 - 2026.

Renja ini memberikan gambaran mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, serta dokumen ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan tahun 2025 guna mencapai sasaran yang diinginkan sehingga hasil pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada tahun 2025 dapat terukur pencapaiannya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan di Tahun 2025 akan melaksanakan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan. Sebagai suatu perencanaan tahunan, dalam pelaksanaannya akan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat tak terduga, seperti perubahan kebijakan dari pusat yang berakibat tidak terlaksananya suatu kegiatan yang di rencanakan serta perubahan anggaran yang berpengaruh pada penambahan maupun pengurangan kegiatan, untuk itu berbagai penyempurnaan akan terus dilakukan dan disesuaikan guna memaksimalkan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.

Salakan, 15 April 2024
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGANSUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MARJAM MAHMUD IBAAD, SH

Pembina Tkt. I
NIP.19670828 200012 2 001